



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR ROHMAN ROSYID
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
3. NHK : 814124

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.365.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/160 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 870.000.000
2. Tanah Seluas 800 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah Seluas 1.065 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 403.500.000

1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 142.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOTOR, YAMAHA XSR-150 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000
6. MOTOR, HONDA VARIO-125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.600.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	333.864.256
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.192.964.256
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.192.964.256

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.